

BAB 1

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Hutan adalah sebidang tanah yang terdiri dari sumberdaya alam hayati yang dalam lingkungan alamnya didominasi oleh pepohonan yang merupakan dalam suatu kesatuan ekosistem ekologi. Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, pemerintah telah menetapkan kawasan hutan yang merupakan kawasan yang ditunjuk dan/atau ditetapkan untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Secara umum, hutan ada untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, agama dan budaya, dan penggunaan lahan hutan akan dipengaruhi oleh luas hutan di suatu wilayah.

Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki kawasan hutan yang luas. Hal ini dapat dilihat dari data Direktorat Jenderal Perencanaan Kehutanan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKTL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hasil pemantauan hutan Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki total luas hutan sebesar 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total luas lahan Indonesia. Kawasan hutan berfungsi sebagai hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi untuk pembangunan. Berdasarkan strategi pembangunan kehutanan jangka panjang, hutan yang sudah tidak produktif lagi (termasuk hutan tebangan, hutan karet, mangrove, beberapa hutan karet kecil, perkebunan kelapa sawit, padang rumput dan lain-lain) digunakan sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI), produk utama adalah kayu (bahan baku yang digunakan dalam industri kertas).

Industrial Plantation didirikan pada tahun 1984 dengan tujuan (1) mendukung pengembangan industri kayu dengan menyediakan bahan baku yang diperlukan secara stabil dan berkelanjutan, (2) mendukung ekspor kayu olahan, dan memenuhi kebutuhan kayu dalam negeri. (3) Meningkatkan potensi produksi kayu di kawasan hutan, terutama di daerah dengan hasil rendah atau non-produktif, dan (4) meningkatkan lapangan kerja dan peluang usaha. (HTI) dikembangkan dengan tiga tujuan utama yang dapat dicapai, yaitu tujuan ekonomi, ekologi dan sosial (Iskandar, 2005) Berdasarkan tujuan tersebut, pembangunan HTI mau tidak mau akan memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi, sosial dan lingkungan masyarakat di sekitar kawasan HTI.

Proses pembangunan HTI, terlibat banyak aspek dan pemangku kepentingan, diantaranya adalah masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Pelaksanaan pembangunan HTI akan semakin cepat dan lancar dengan adanya peran dan partisipatif dari masyarakat sekitar HTI, baik dalam memberikan dukungan material maupun non material serta bekerjasama dengan pihak lainnya yang terlibat. Berdasarkan partisipasi dari masyarakat tersebut, maka pembangunan HTI akan mempengaruhi kehidupan masyarakat baik dari segi sosial maupun dari segi ekonomi.

Pembangunan HTI secara besar-besaran dan berjangka panjang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah peningkatan kesempatan kerja. Pembangunan lebih dipusatkan pada kemampuan entitas komersial untuk menyediakan lapangan kerja dan peluang usaha kepada masyarakat. Iskandar (2005), menyatakan bahwa HTI mengembangkan badan usaha untuk menyediakan tiga unsur utama

kesempatan kerja, yaitu bekerja sebagai karyawan pada perusahaan, bekerja sebagai kontraktor komersial pada perusahaan, dan melayani karyawan perusahaan.

Sebelum adanya kawasan HTI, keterkaitan masyarakat dengan sumber daya hutan adalah satu kesatuan ekosistem yang saling mempengaruhi, oleh karena model pembangunan kehutanan yang dilakukan adalah model pembangunan yang memadukan antara kebutuhan, pendapatan dan kesejahteraan. Dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut, masyarakat sekitar hutan secara keseluruhan masih sangat rendah. Partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan masyarakat di yang tinggal di sekitar kawasan HTI sebagai sumber tenaga kerja.

Luas lahan yang dikuasai oleh perusahaan Hutan Tanaman Industri mulai tahun 2015 – 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Luas Lahan yang Dikuasai Perusahaan HTI (Ha) di Indonesia Tahun 2015 – 2019

Tahun	Perusahaan HTI (Ha)	Perum Perhutani (Ha)	Total (Ha)
2015	7.439.289	3.931.523	11.370.812
2016	8.117.872	2.428.608	10.546.480
2017	8.080.864	2.468.120	10.548.984
2018	8.668.670	2.362.399	11.031.069
2019	7.070.091	2.232.106	9.302.197

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa luas lahan yang dikuasai oleh perusahaan HTI jauh lebih luas dibandingkan dengan Perum Perhutani. Pada tahun 2019, total luas lahan yang dikuasai perusahaan HTI sebesar 7,07 juta Ha. Luas lahan ini tersebar di beberapa pulau di beberapa wilayah Indonesia. Penguasaan lahan terluas oleh perusahaan HTI tahun 2019 terletak pada Pulau Sumatera yakni dengan luas 3,76 juta Ha (53,12 persen) dan Pulau Kalimantan 3,12 juta Ha

(44,19 persen). Luas lahan yang dikuasai oleh perusahaan HTI di Sumatera Utara disajikan pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2. Luas Lahan yang Dikuasai Perusahaan HTI (Ha) di Sumatera Utara tahun 2018

Perusahaan	Luas (Ha)
PT. Toba Pulp Lestari Tbk	167.912,00
PT. Sumatera Riang Lestari	61.491,04
PT. Anugerah Rimba Makmur	49.209,31
PT. Sumatera Sylva Lestari	32.284,85
PT. Hutan Barumun Perkasa 3	12.253,92
PT. Putra Lika Perkasa	10.051,51
PT. Sinar Belantara Indah	4.381,49
Total	337.584,12

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Luas lahan yang dikuasai perusahaan HTI di Sumatera Utara lebih banyak oleh PT. TPL. Lahan-lahan yang dikuasai merupakan tanah negara dan tanah rakyat, tanah sewa, tanah milik perusahaan serta tanah lain seperti tanah desa dan tanah adat. Dalam hal ini luas lahan yang dikuasai tidak mengikutsertakan lahan yang dikuasai oleh pihak lain. Berdasarkan statusnya tersebut, lahan yang dikuasai oleh perusahaan HTI merupakan tanah negara.

Kawasan HTI Sektor Habinsaran Kabupaten Toba telah dikelola oleh PT. TPL sejak tahun 2003. Luasnya mencapai 26.765 hektar dan bertujuan untuk memenuhi permintaan impor kertas domestik dari berbagai negara yang terus meningkat. Sebagian besar hutan tanaman industri mengelola lahan sesuai dengan peraturan pemerintah dan memiliki lahan milik masyarakat lokal yang disewakan/dikontrakkan. Perkembangan perkebunan industri telah mempengaruhi kondisi masyarakat sekitar, khususnya warga Desa Simare Kecamatan Bobor Kabupaten Toba.

Kecamatan Borbor merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Toba yang terbentuk pada tahun 2004 dengan 15 desa dengan luas 176,65 km² (17.665 ha), menyumbang 8,74% dari total luas wilayah Kabupaten Toba. Kecamatan Bobor terletak pada 2° 03'-2°18' LU dan 99° 13'-99° 31' BT. Kecamatan Borbor terletak pada ketinggian 1.000 – 1.650 m dpl. Salah satu desa di Kecamatan Borbor adalah Desa Simare sebagai tempat penelitian. Desa Simare memiliki luas 538 ha yang terdiri dari 4 dusun. Dusun I seluas 305,8 ha, dusun II seluas 43,5 ha, dusun III seluas 2,7 ha dan dusun IV seluas 186 ha.

Desa Simare yang berdiri pada tahun 2008 mayoritas adalah suku Toba. Pada umumnya masyarakat Desa Simare memiliki mata pencaharian sebagai petani dan karyawan PT. TPL Industrial Plantation (HTI), yang sebagian memperoleh penghasilan dari usaha sendiri, seperti warung makan dan warung kopi. Perusahaan HTI di Desa Simare dikelola oleh PT. TPL. Ada begitu banyak perusahaan-perusahaan kecil (CV) yang mengelola perkebunan industri tersebut, sehingga dengan adanya dampak pengelolaan hutan tanaman industri mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Dampak kehadiran PT. TPL ada yang positif dan ada yang negatif. Dampak positif terjadi pada masyarakat yang memiliki lahan yang disewa PT. TPL dan yang bekerja pada perusahaan tersebut, sedangkan dampak negatif terjadi pada masyarakat yang tidak berhubungan dengan perusahaan tersebut.

Hubungan kemitraan lahan masyarakat dengan PT. TPL dilakukan melalui pemanfaatan lahan-lahan kurang produktif yang terdapat di sekitar wilayah areal kerja perusahaan dengan bentuk pola kemitraan bersama antara

masyarakat dengan perusahaan. Tahun 2017, masyarakat melakukan kerjasama dengan perusahaan dengan penanaman lahan seluas 1.602 Ha, dan berlanjut pada tahun 2018 dengan penanaman lahan seluas 2.060 Ha. Hubungan kemitraan ini dilakukan oleh perusahaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar HTI. Disamping itu penanaman lahan-lahan ini bertujuan untuk peningkatan bahan baku pada perusahaan. Pola kemitraan antara masyarakat dengan perusahaan ini dilakukan secara bertahap yang bertujuan untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat. Distribusi bagi hasil yang dilakukan yaitu bagi hasil setelah unur penanaman 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan setelah dilakukan pemanenan. Kerjasama kemitraan yang dilakukan tidak hanya pada pengembangan wilayah kerja, tetapi juga dilakukan melalui program intercrop (tumpang sari). Pola kemitraan yang terbentuk semakin baik dengan adanya program intercrop. Dalam hal ini areal yang sudah ditanami dengan tanaman hutan, areal tersebut masih dapat digunakan oleh masyarakat pemilik lahan dengan menanaminya dengan tanaman semusim seperti cabai, jagung, jahe, kunyit, kentang, padi maupun tanaman lainnya. Pada pelaksanaan program intercrop (tumpang sari), perusahaan membantu masyarakat dalam penyediaan bibit, pupuk dan pestisida, sedangkan biaya pengolahan lahan ditanggung oleh pemilik lahan. Untuk rotasi penanaman selanjutnya penyediaan bibit, pupuk dan pestisida sudah dapat ditanggung oleh pemilik lahan. Dengan demikian untuk penanaman pertama pemilik lahan dibantu oleh perusahaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dampak dari adanya perkebunan industri di Desa simare, Kecamatan Bobor, perlu mendapat perhatian dan

kontribusi. Perhatian dan kontribusi yang diharapkan harus dilakukan oleh pemerintah dan semua sektor masyarakat di Kecamatan Borbor Kabupaten Toba. Dengan adanya penjelasan tersebut maka peneliti melakukan penelitian mengenai dampak HTI PT. TPL. Sektor Habinsaran terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Simare Kecamatan Borbor Kabupaten Toba.

b. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Keberadaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. TPL di Desa Simare Kecamatan Borbor meresahkan bagi masyarakat setempat.
2. Dampak Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. TPL dalam mengurangi banyaknya pengangguran.
3. Dampak Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. TPL terhadap sosial ekonomi masyarakat Desa Simare, Kecamatan Borbor.

c. Batasan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka masalah yang diteliti dibatasi pada dampak Hutan Tanam Industri (HTI) PT. TPL terhadap sosial dan ekonomi karyawan PT. TPL.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini didasarkan pada batasan masalah penelitian. Beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana dampak Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Toba Pulp Lestari terhadap sektor sosial karyawan PT. Toba Pulp Lestari.?
2. Bagaimana dampak Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Toba Pulp Lestari terhadap sektor ekonomi karyawan PT. Toba Pulp Lestari?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dampak Hutan Tanaman Industri PT. Toba Pulp Lestari terhadap sektor sosial karyawan PT. Toba Pulp Lestari.
2. Mengetahui dampak keberadaan Hutan Tanaman Industri PT. Toba Pulp Lestari terhadap sektor ekonomi karyawan PT. Toba Pulp Lestari

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat teoritis sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya yang relevan.
- b. Pengaplikasian ilmu geografis yang mampu menganalisis dampak Hutan Tanaman Industri terhadap kehidupan sosial ekonomi karyawan PT. Toba Pulp Lestari.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang didapat dari penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Toba sehingga dapat menangani permasalahan sosial ekonomi yang dialami masyarakat setempat di Desa Simare, Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba dengan kehadiran perusahaan HTI.
- b. Sebagai referensi bagi Dinas Kehutanan Kabupaten Toba untuk perbaikan pengelolaan hutan di Kabupaten Toba.

